

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara istilah merupakan perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Makna dari melakukan serangkaian “ibadah tertentu” yaitu yang termasuk kategori rukun haji dan wajib haji seperti ihram, wukuf, mabit, melontar jumrah, thawaf, sai dan tahallul. Sedangkan makna “pada waktu tertentu” yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Adapun makna yang dilakukan “di tempat tertentu” seperti dalam pengertian di atas ialah sekitaran Ka’bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina.¹ Sebagai rukun Islam, haji hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma’ ulama.

Diantara ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan kewajiban berhaji yaitu firman Allah QS. Ali Imran /3:97.

فِيهِ أَيْتَاتٌ مَّقَامُ الْإِزْهَامِ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

¹ Said Agil dan Abdul Halim, *Fikih Haji* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Haji menjadi wajib bagi setiap muslim dengan memenuhi beberapa syarat. Apabila seseorang tidak mencukupi syarat yang ditetapkan maka orang itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Syarat itu ialah orang Islam yang telah baligh, berakal sehat (tidak gila), mempunyai kebebasan dan kemerdekaan penuh serta memiliki kemampuan. Adapun kesanggupan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan ke dalam dua pengertian, yaitu:

Pertama, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (negara dan pemerintah) mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas akomodasi, transportasi dan hubungan antarnegara khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Kedua, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu antara lain meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan didukung pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.²

Akan tetapi secara umum tujuan para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji adalah sama-sama untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dalam mencapai predikat tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena salah

² Achmad Nidjani dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Jakarta: Media Cita, 2006), h. 6.

satu persyaratan yaitu pemahaman mengenai materi manasik haji yang benar dan mampu menerapkannya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, pemberian materi yang bagus dari pembimbing sangatlah diperlukan agar bisa memandirikan para jemaah haji nantinya saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Melalui penyampaian materi ataupun praktik dari pembimbinglah para jemaah bisa belajar tentang cara-cara manasik haji dengan benar dan bisa langsung menanyakan berkaitan dengan hal-hal yang kurang dimengerti seputar manasik haji kepada pembimbingnya.

Kenyataannya masih banyak jemaah yang belum memahami bimbingan manasik haji yang diadakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota nampaknya dikarenakan beberapa alasan. Diantaranya perbedaan latar belakang jemaah yang mengikuti bimbingan manasik, pertemuan yang disediakan pemerintah dianggap tidaklah cukup untuk membuat jemaah memahami manasik, perencanaan dari panitia yang kurang maksimal dalam melayani jemaah, keterlambatan orang-orang yang terlibat dalam manasik haji, serta tempat pelaksanaan juga menjadi alasan para jemaah kurang memahami manasik. Contohnya saat melempar jumrah serta sa'i dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang dari semua pihak yang bersangkutan agar pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan dalam waktu yang sempit bisa efektif dan efisien dapat mewujudkan jemaah haji yang mandiri serta memahami seluk beluk dari manasik haji.³

³ Wawancara dengan Ibu Siti Atiyah, jemaah haji, 16 agustus 2020.

Latar belakang jemaah haji yang berbeda-beda dari segi pendidikan, usia, pekerjaan, ekonomi, menjadi permasalahan dalam bimbingan manasik haji. Keterbatasan pembimbing manasik haji yang memiliki sertifikasi nasional hanya ada dua orang yang dikirim dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengikuti pelatihan di Surabaya. Jika itu dijadikan standar untuk menjadi pembimbing manasik haji otomatis tidak bisa mengadakan manasik haji karena kurangnya pembimbing yang memenuhi standar.

Jadi dari pihak Kementerian Agama mencari lagi yang pernah ikut diklat bimbingan manasik haji walaupun hanya di adakan di Kanwil.⁴ Hal tersebut akan mempengaruhi seberapa mampu jemaah bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan manasik haji.

Mengikuti bimbingan manasik haji adalah salah satu proses lanjutan yang sudah dilalui oleh jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci. Jemaah yang akan menunaikan ibadah haji harus melalui proses yang panjang, dilakukan sejak dari pembayaran biaya perjalanan haji di bank, pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat nomor porsi, penyelesaian dokumen haji (paspor), pemeriksaan kesehatan haji, mengikuti bimbingan manasik haji massal maupun kelompok, pemberangkatan dari rumah tempat tinggal menuju emberkasi (asrama haji), berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sampai pada pemulangan ke tanah air.

⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 25 November 2019.

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu adalah lembaga keagamaan yang didalamnya ada satuan kerja seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu tentulah Seksi PHU perlu mempersiapkan sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang mengamanatkan agar memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal yang diperlukan oleh jemaah haji.⁵

Melihat dari uraian tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki jemaah yang kompleks dapat melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai dengan syariat, dapat menjaga kemabruran hajinya serta bagaimana manajemen bimbingan manasik haji dalam upaya meningkatkan pemahaman materi kepada jemaah, bagaimana unsur-unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji bisa berjalan sesuai dengan harapan.

⁵ Departemen Agama RI , *Modal Pembelajaran Manasik Haji* (Jakarta: Dirjen PHU, 2006), h. 104.

Sebagaimana latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa saja Unsur-unsur Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Untuk mengetahui Unsur-unsur Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu?

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis dalam bidang manajemen.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam upaya peningkatan kualitas bimbingan manasik haji khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Kemenag Kabupaten Tanah Bumbu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu secara umum, agar mampu mempertahankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum tercapai secara optimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan manajemen dakwah khususnya dalam manajemen haji dan umrah serta untuk menerapkan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah dengan praktik yang ada di lapangan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan judul diatas, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dari penelitian ini:

1. Manajemen

Manajemen secara terminologi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶ Manajemen dikatakan baik apabila suatu organisasi/lembaga itu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua yang terlibat dalam kegiatan organisasi itu.⁷

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara persiapan kegiatan manasik haji dengan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien yang ingin dicapai di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

2. Bimbingan

Bimbingan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau penjelasan.⁸

Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petunjuk atau tuntunan yang di arahkan oleh pembimbing sesuai arahan yang diperlukan untuk

⁶ Munir dan Wahyu Ilaihi , *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 9.

⁷ Lasa H. S, *Manajemen Perpustakaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 2.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 152.

para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, mencakup semua pedoman materi yang ada dalam bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

3. Manasik Haji

Haji menurut Kementerian Agama Republik Indonesia adalah rangkaian haji diawali dengan ihram, yang terdiri dari wajib dan sunnah.⁹ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun yang biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya.¹⁰

Manasik haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peragaan seluruh rangkaian ibadah haji baik itu perintah wajib maupun sunnah seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf dengan menggunakan miniatur Ka'bah tiruan untuk praktik tentang haji.

Jadi, Manajemen Bimbingan Manasik Haji yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu pemanfaatan sumber daya manusia untuk memberikan bantuan berupa pembekalan, arahan, dan pedoman, tata cara haji kepada jemaah haji agar mampu memahami rangkaian ibadah haji.

⁹ Muhammad Hidayat, *eksiklopedia Haji dan Umrah (petunjuk lengkap Tata Cara pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah)*, (Jakarta Timur: PT Bestari Busana Murni, 2014), h. 20.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 165.

4. Unsur-unsur Manajemen

- a. *Man* (Manusia)
- b. *Money* (uang)
- c. *Machines* (mesin-mesin)
- d. *Materials* (bahan-bahan)
- e. *Methods* (metode)
- f. *Market* (pasar)¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai pemikiran dasar penulisan skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada untuk menghindari adanya kesan pengulangan atau tindakan plagiat dalam penelitian. Adapun penelitian senada yang menjadi perbandingan dalam rujukan diantara adalah:

1. Skripsi Dina Andriani yang berjudul "Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2018". Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari skripsi tersebut dapat dilihat bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama pada masalah bimbingan manasik haji namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek yang dilakukan oleh peneliti.
2. Skripsi Ahmad Sarbani dan Asep Iwan Setiawan yang berjudul 'Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok

¹¹ Badrudin. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung:Alfabeta, 2017). h. 186.

Bimbingan Haji”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam upaya yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengenai bimbingan manasik haji. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas implementasi fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji.

3. Skripsi Ani Sulistina dan Rahima Zakia yang berjudul “ Manajemen Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen manasik haji pada KBIH Al-Hikmah Muaro Sijunjung. Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengenai bimbingan manasik haji. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas Manajemen Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung yang terdapat perbedaan di kelompok bimbingan ibadah haji dan lokasi penelitiannya di Muaro Sijunjung.

4. Skripsi Rio Iskandar yang berjudul “ Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengenai bimbingan manasik haji namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian tersebut tidak membahas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori memuat Pengertian Manajemen, Sarana Manajemen, Unsur-Unsur Manajemen, Fungsi-Fungsi Manajemen, Pengertian Bimbingan Manasik Haji, Tujuan Bimbingan Manasik Haji, Aktivitas Bimbingan Manasik Haji, Pengertian Ibadah Haji, Dasar Hukum Ibadah Haji, Syarat Ibadah Haji, Rukun Ibadah Haji, Wajib Ibadah Haji, Macam-macam Ibadah Haji.

BAB III : Metode Penelitian Memuat Pendekatan dan Jenis Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan Data Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, Hasil Penelitian, dan Analisis Data.

BAB V : Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.